

MANAJEMEN PENANGGULANGAN KEMISKINAN: PENDEKATAN ELASTISITAS

LALU MUH. KABUL

Akademi Sekretari dan Manajemen (ASM) Mataram

e-mail: Kabullpp@yahoo.com

ABSTRAK

Penelitian ini menekankan pada manajemen pengentasan kemiskinan dengan menggunakan pendekatan elastisitas. Metode penelitian yang digunakan adalah metode pencampuran: kuantitatif dan kualitatif. Sumber data adalah data primer dan data sekunder. Untuk pengumpulan data digunakan wawancara dan FGD. Elastisitas pertumbuhan kemiskinan, Pro-Poor Growth Index, Force Field Analysis adalah alat yang digunakan untuk menganalisis data. Hasil penelitian menunjukkan bahwa strategi pengelolaan pengentasan kemiskinan berpihak pada orang miskin. Namun, penyimpangan pengentasan kemiskinan di masa depan harus ditingkatkan menuju pertumbuhan yang berorientasi dan ramah lingkungan.

Kata kunci: manajemen, pengentasan kemiskinan, pendekatan elastisitas.

ABSTRACT

The research stressed at poverty reduction management by using elasticity approach. The research method was mixing method: quantitative and qualitative. Data sources were primary and secondary data. For data collecting used interview and FGD. Growth elasticity of poverty, Pro-Poor Growth Index, Force Field Analysis were tools employed to analysis the data. The research results showed that the management strategy of poverty reduction is pro-poor. However, the stragey of poverty reduction in the future must be improved toward a growth oriented as well as environtmental friendly.

Keywords: management, poverty reduction, elasticity approach.

PENDAHULUAN

Latar Belakang

Semua negara anggota Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) termasuk Indonesia telah bersepakat bahwa tujuan pertama dari Tujuan Pembangunan Berkelanjutan Tahun 2030 atau *Sustainable Development Goals* (SDGs 2030) yang merupakan keberlanjutan dari Millenium Development Goals (MDGs 2015) adalah penanggulangan kemiskinan. Di Indonesia, penanggulangan kemiskinan tidak hanya menjadi tanggung jawab pemerintah pusat, tetapi juga pemerintah daerah. Mengenai hubungan antara pertumbuhan ekonomi dan kemiskinan diukur menggunakan pendekatan elastisitas yang dikenal dengan elastisitas pertumbuhan terhadap kemiskinan (*growth elasticity of poverty*). Elastisitas pertumbuhan terhadap kemiskinan menggambarkan perubahan kemiskinan yang dihasilkan oleh pertumbuhan ekonomi (Ravallion dan Chen, 1997; McCulloch dan Baulch, 2000; Bourguignon, 2003; World Bank, 2005; UNDP, 2003).

Penelitian elastisitas pertumbuhan terhadap kemiskinan di Indonesia baik di perdesaan maupun perkotaan dalam periode 1984-2002 dilakukan antara lain oleh Suryahadi Asep et al (2012) dan hasil penelitiannya menunjukkan bahwa elastisitas pertumbuhan terhadap kemiskinan di perdesaan sebesar minus (-0,31 persen); artinya kenaikan pertumbuhan ekonomi sebesar 1 persen menghasilkan penurunan kemiskinan sebesar 0,31 persen. Sedangkan elastisitas pertumbuhan terhadap kemiskinan di perkotaan sebesar minus (-0,22); artinya kenaikan pertumbuhan ekonomi sebesar 1 persen menghasilkan penurunan kemiskinan sebesar 0,22 persen. Disisi lain, elastisitas pertumbuhan ekonomi terhadap kemiskinan di perdesaan sebelum krisis sebesar minus (-0,30) dan setelah krisis sebesar minus (-0,37). Di perkotaan

elastisitas pertumbuhan ekonomi terhadap kemiskinan sebelum krisis sebesar minus (-0,20) dan setelah krisis sebesar minus (-0,23).

Dikenal dua mekanisme mengenai bagaimana mengalirnya pertumbuhan ekonomi tersebut ke lapisan masyarakat miskin (Ravallion dan Chen, 1997; Kakwani N et al, 2000). Pertama, “*trickle down effect*” dimana pertumbuhan ekonomi tidak mengalir secara langsung ke lapisan masyarakat miskin, tetapi terlebih dahulu mengalir ke lapisan masyarakat kaya dan setelah itu dari lapisan masyarakat kaya menetes ke lapisan masyarakat miskin. Kedua “*equity effect*” atau dampak pemerataan dimana lapisan masyarakat miskin dilibatkan untuk berpartisipasi secara langsung dalam aktivitas ekonomi, sehingga pertumbuhan ekonomi mengalir secara langsung ke lapisan masyarakat miskin. Dalam pada itu, mengenai pentingnya kaitan antara pertumbuhan ekonomi dan “*equity*” selaras dengan hipotesis kurva U terbalik yang dikemukakan Kuznets (dalam Barro, 2000) bahwa pada tahap awal pembangunan ekonomi ketimpangan meningkat kemudian menurun atau terciptanya pemerataan pada tahap selanjutnya.

Elastisitas pertumbuhan ekonomi terhadap kemiskinan merupakan dasar bagi perhitungan *Pro-Poor Growth Index* atau Indeks Pro-Kemiskinan Pertumbuhan yang diperkenalkan oleh Kakwani dan Pernia (2000). Dalam pada itu, Indeks Pro-Kemiskinan Pertumbuhan (IPKP) merupakan sebuah perbandingan (rasio) antarperubahan kemiskinan yang dihasilkan oleh pertumbuhan ekonomi seiring dengan berubahnya pemerataan dengan perubahan kemiskinan yang dihasilkan oleh pertumbuhan ekonomi pada tingkat pemerataan tetap (Kakwani dan Pernia, 2000). IPKP merupakan indikator untuk mengetahui apakah kebijakan pemerintah telah “*pro-poor*” (pro-kemiskinan) atau tidak. Seperti dibahas sebelumnya bahwa kebijakan penanggulangan kemiskinan tidak hanya menjadi tanggung jawab pemerintah pusat, melainkan juga pemerintah daerah. Oleh karena itu pula, di daerah baik di provinsi maupun kabupaten/kota telah dibentuk Tim Koordinasi Percepatan Penanggulangan Kemiskinan Daerah (TKP2D). Selama ini, indikator kinerja TKP2D hanya diukur dari persentase penduduk miskin (*headcount index*), indeks kedalaman kemiskinan, dan indeks keparahan kemiskinan. Namun ketiga indikator tersebut tidak menggambarkan apakah kebijakan TKP2D telah “*pro-poor*” atau tidak. Untuk itu, elastisitas pertumbuhan ekonomi terhadap kemiskinan dan IPKP dapat digunakan sebagai indikator untuk mengukur kinerja TKP2D apakah kebijakan pemerintah daerah (TKP2D) telah “*pro-poor*” atau tidak. Berbagai penelitian mengenai elastisitas pertumbuhan terhadap kemiskinan dan IPKP di daerah masih tergolong langka. Meskipun Suryahadi Asep et al (2012) telah melakukan penelitian mengenai elastisitas pertumbuhan terhadap kemiskinan tetapi ruang lingkup penelitiannya adalah pada tingkat nasional, bukan daerah dan penelitiannya tidak mencakup IPKP.

Penelitian “Manajemen Penanggulangan Kemiskinan” dengan menggunakan pendekatan elastisitas ini di daerah, yakni Kabupaten Lombok Timur dilakukan untuk mengisi kelangkaan penelitian dimaksud. Disisi lain, hasil penelitian ini diharapkan dapat dimanfaatkan oleh TKP2D sebagai indikator dalam manajemen penanggulangan kemiskinan di daerah.

Rumusan Masalah

Rumusan permasalahan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: (1) Berapa besar elastisitas pertumbuhan ekonomi terhadap kemiskinan?, (2) Berapa besar Indeks Pro-Kemiskinan Pertumbuhan (IPKP)?, (3) Apa manajemen strategis program penanggulangan kemiskinan di daerah?.

Tujuan Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan dengan tujuan sebagai berikut: (1) menganalisis elastisitas pertumbuhan ekonomi terhadap kemiskinan, (2) menganalisis Indeks Pro-Kemiskinan Pertumbuhan (IPKP), (3) merumuskan manajemen strategi penanggulangan kemiskinan di daerah.

METODE PENELITIAN

Metode pendekatan

Dalam penelitian ini digunakan pendekatan *mixing methods* (Branen J, 1993), yakni integrasi pendekatan kuantitatif dan kualitatif. Penelitian ini dilaksanakan di Kabupaten Lombok Timur dengan pertimbangan bahwa dari 10 kabupaten/kota di Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) jumlah kemiskinan absolut terbesar terdapat di Kabupaten Lombok Timur (BPS Lombok Timur, 2017). Penelitian ini dilaksanakan selama 4 bulan, yakni September-Desember 2017. Sumber data penelitian adalah data primer dan data sekunder. Data sekunder berupa data kuantitatif diperoleh dari data berkala (*time series*) yang diterbitkan oleh BPS Lombok Timur dan badan/lembaga terkait. Sedangkan data

primer diperoleh melalui wawancara mendalam (*indepth interview*) dan diskusi kelompok terarah (*Focus Group Discussion*) dengan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait dan TPK2D Kabupaten Lombok Timur.

Variabel

Variabel penelitian meliputi elastisitas pertumbuhan terhadap kemiskinan (*growth elasticity of poor*) dan Indeks Pro-Kemiskinan Pertumbuhan/IPKP (*Pro-Poor Growth Index*). Elastisitas pertumbuhan terhadap kemiskinan menggambarkan perubahan kemiskinan yang dihasilkan oleh pertumbuhan ekonomi seiring dengan berubahnya pemerataan. Dalam pada itu, IPKP merupakan sebuah perbandingan (rasio) antara perubahan kemiskinan yang dihasilkan oleh pertumbuhan ekonomi seiring dengan berubahnya pemerataan dengan perubahan kemiskinan yang dihasilkan oleh pertumbuhan ekonomi pada tingkat pemerataan tetap.

Analisis Data

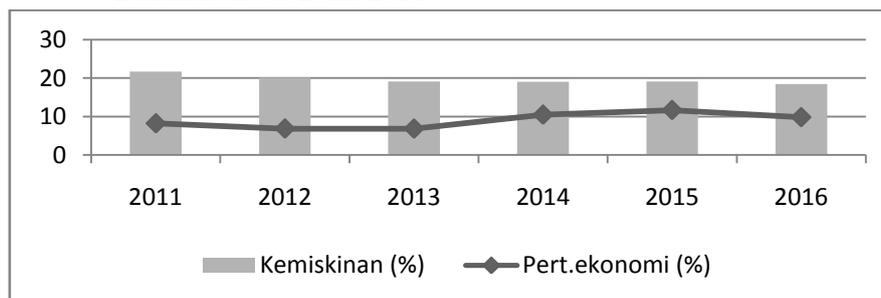
Elastisitas pertumbuhan terhadap kemiskinan (η) merupakan perubahan kemiskinan (∂P) yang dihasilkan oleh pertumbuhan ekonomi seiring dengan berubahnya pemerataan pendapatan (∂Y) (Kakwani dan Pernia, 2000) atau secara matematis: $\eta = (\partial P / \partial Y)(Y/P)$. Sementara, Indeks Pro-Kemiskinan Pertumbuhan/IPKP (ϕ) merupakan sebuah perbandingan (rasio) antara perubahan kemiskinan yang dihasilkan oleh pertumbuhan ekonomi seiring dengan berubahnya pemerataan (η) dengan perubahan kemiskinan yang dihasilkan oleh pertumbuhan ekonomi pada tingkat pemerataan tetap (η_g) (Kakwani dan Pernia, 2000) atau secara matematis $\phi = \eta / \eta_g$. Perubahan kemiskinan yang dihasilkan oleh pertumbuhan ekonomi pada tingkat pemerataan tetap (η_g) juga dikenal sebagai efek pertumbuhan. Dalam pada itu, manajemen penanggulangan kemiskinan dinyatakan “pro-poor”, jika $\phi > 1$, bersifat “trickle down” jika $0 < \phi < 1$ dan “anti-poor” jika $\phi < 0$. Disisi lain, untuk merumuskan manajemen strategi penanggulangankemiskinan digunakan *Force Field Analysis* (Swanson DJ et al, 2014).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Elastisitas Pertumbuhan Terhadap Kemiskinan

Perekonomian Lombok Timur dalam periode 2011-2016 mengalami pertumbuhan rata-rata 5,51 persen. Pertumbuhan ekonomi per kapita Lombok Timur pada tahun 2011 mencapai 8,09 persen kemudian sebesar 6,84 persen pada tahun 2012; sebesar 6,81 persen pada tahun 2013; sebesar 10,43 persen pada tahun 2014; sebesar 11,63 persen pada tahun 2015 dan sebesar 9,78 persen pada tahun 2016. Disisi lain, persentase kemiskinan (*headcount index*) merupakan persentase penduduk yang hidup dibawah garis kemiskinan. Persentase kemiskinan di Lombok Timur dalam periode 2011-2016 mengalami penurunan dari 21,71 persen pada tahun 2011 menjadi sebesar 20,08 persen pada tahun 2012; sebesar 19,15 persen pada tahun 2013; sebesar 19,00 persen pada tahun 2014; sebesar 19,14 persen pada tahun 2015 dan 18,46 persen pada tahun 2016. Pertumbuhan ekonomi per kapita dan persentase kemiskinan di Lombok Timur dalam periode 2011-2016 ditampilkan pada gambar 1.

Gambar 1. Pertumbuhan Ekonomi dan Kemiskinan di Lombok Timur
Dalam Periode 2011-2016



Sumber: BPS Lombok Timur (2017)

Disisi lain, Indeks Kedalaman Kemiskinan/IKdK (*poverty gap index*) merupakan ukuran rata-rata kesenjangan pendapatan maupun pengeluaran masing-masing penduduk miskin terhadap garis kemiskinan

(BPS Lombok Timur, 2011). Semakin tinggi nilai IKdK, semakin jauh rata-rata pendapatan penduduk miskin dari garis kemiskinan, demikian sebaliknya. IKdK Lombok Timur pada tahun 2011 mencapai 3,40 kemudian turun menjadi 2,88 pada tahun 2016 (BPS Lombok Timur, 2017). Turunnya nilai IKdK ini menggambarkan bahwa dalam periode 2011-2016 pendapatan penduduk miskin di Lombok Timur tidak statis, melainkan bergerak naik mendekati garis kemiskinan. Sementara itu, Indeks Keparahan Kemiskinan/IKpK (*poverty severity index*) memberikan gambaran mengenai penyebaran pendapatan di antara penduduk miskin (BPS Lombok Timur, 2011). Semakin tinggi nilai IKpK, semakin tinggi ketimpangan pendapatan di antara penduduk miskin. Turunnya nilai IKpK di Lombok Timur dari 0,76 pada tahun 2011 menjadi 0,68 pada tahun 2016 (BPS Lombok Timur, 2017) menggambarkan makin berkurangnya ketimpangan pendapatan di antara penduduk miskin.

Baik nilai IKdK maupun IKpK tidak bisa digunakan sebagai indikator untuk mengukur sejauh mana penduduk miskin memperoleh manfaat dari pertumbuhan ekonomi. Oleh karena itu digunakan indikator elastisitas pertumbuhan terhadap kemiskinan (*growth elasticity of poverty*) yang menggambarkan perubahan kemiskinan yang dihasilkan oleh pertumbuhan ekonomi, yakni penurunan persentase kemiskinan yang dihasilkan oleh kenaikan pertumbuhan ekonomi sebesar 1 persen. Nilai elastisitas pertumbuhan terhadap kemiskinan (η) di Lombok Timur dalam periode 2011-2016 ditampilkan pada tabel 1.

Tabel 1. Elastisitas Pertumbuhan Terhadap Kemiskinan di Lombok Timur
Dalam Periode 2011-2016

No	Indikator	Periode 2011-2016
1.	Persentase Kemiskinan/ <i>Headcountindex</i> (%)	-3,25
2.	Pertumbuhan ekonomi perkapita (%)	1,69
3.	Elastisitas Pertumbuhan Terhadap Kemiskinan (η)	-1,92

Sumber: Data diolah

Nilai elastisitas pertumbuhan terhadap kemiskinan di Lombok Timur dalam periode 2011-2016 sebesar minus (-1,92 persen); artinya terjadi penurunan kemiskinan sebesar 1,92 persen yang dihasilkan oleh kenaikan pertumbuhan ekonomi sebesar 1 persen. Menurut Ram (2006,2011) nilai elastisitas pertumbuhan terhadap kemiskinan berkisar antarasebesar minus (-0,84) hingga sebesar minus (-3,12). Ini menggambarkan diperlukannya upaya maksimal untuk memacu pertumbuhan ekonomi guna menurunkan tingkat kemiskinan.

Indeks Pro-Kemiskinan Pertumbuhan

Indeks Pro-Kemiskinan Pertumbuhan/IPKP yang dikemukakan Kakwani dan Pernia(2000) merupakan sebuah perbandingan (rasio) antara perubahan kemiskinan yang dihasilkan oleh pertumbuhan ekonomi seiring dengan berubahnya pemerataan dengan perubahan kemiskinan yang dihasilkan oleh pertumbuhan ekonomi pada tingkat pemerataan tetap. Nilai IPKP di Lombok Timur dalam periode 2011-2016 ditampilkan pada tabel 2. Nilai IPKP (ϕ) Lombok Timur dalam periode 2011-2016 sebesar 1,15. Artinya nilai IPKP (ϕ) Lombok Timur dalam periode 2011-2016 lebih dari satu ($\phi=1,15>1$). Oleh karena itu, maka dapat dinyatakan bahwa manajemen penanggulangan kemiskinan di Lombok Timur adalah “pro-poor”.

Manajemen strategis “pro-poor” di Lombok Timur meliputi 3 kluster. Pertama, bantuan langsung untuk lapisan masyarakat yang tergolong “sangat miskin”. Kedua, pemberdayaan untuk lapisan masyarakat yang tergolong “miskin”. Ketiga, kemitraan untuk lapisan masyarakat yang tergolong “hampir miskin”. Ketiga kluster tersebut oleh TP2KD Lombok Timur disinergikan pelaksanaannya dengan program pemerintah pusat.

Tabel 2. Indeks Pro Kemiskinan Pertumbuhan di Lombok Timur Dalam Periode 2011-2016

No	Indikator	Periode 2011-2016
1.	Elastisitas Pertumbuhan Terhadap Kemiskinan (η)	-1,92
2.	Efek Pertumbuhan (ηg)	-1,67
3.	Indeks Pro-Kemiskinan Pertumbuhan (ϕ)	1,15

Sumber: Data diolah

Implementasi dari ketiga kluster tersebut berkaitan dengan turunnya ketimpangan di Lombok Timur dengan Indeks Gini sebesar 0,27 pada tahun 2015 (SMERU,2016). Indeks Gini dibawah 0,4 tergolong dalam kategori ketimpangan rendah (Susanti et al, 1995). Dengan perkataan lain, turunnya kemiskinan di Lombok Timur berkaitan dengan turunnya ketimpangan. Hal ini selaras dengan kaitan ketimpangan dan kemiskinan

yang dikemukakan oleh Kakwani dan Pernia (2000) bahwa naik (turunnya) ketimpangan sejalan dengan naik (turunnya) kemiskinan.

Strategi Penanggulangan Kemiskinan

Penurunan kemiskinan berkaitan dengan dua komponen, yakni pertumbuhan ekonomi dan ketimpangan (Kakwani dan Pernia, 2000; Kakwani et al, 2000). Upaya pemerintah daerah (TP2KD) Lombok Timur dalam menurunkan ketimpangan telah cukup optimal dengan turunnya Indeks Gini mencapai 0,27 atau tergolong ketimpangan rendah. Dari sisi pertumbuhan, upaya pemerintah daerah tampaknya belum optimal dimana pertumbuhan ekonomi Lombok Timur tidak mengalami kenaikan secara berkelanjutan, tetapi fluktuatif sebagaimana telah ditampilkan pada gambar 1. Untuk itu meskipun manajemen penanggulangan kemiskinan Lombok Timur dalam periode 2011-2016 telah tergolong “pro-poor”, tetapi diperlukan perbaikan strategi yang berorientasi pada pertumbuhan (*growth oriented*).

Dalam teori pertumbuhan Harrod-Domar dimana tabungan (*saving*) diperlukan untuk akumulasi modal (Durlauf SN et al, 2001). Dari 3 kluster di Lombok Timur untuk kluster pertama (sangat miskin) tidak hanya sekadar diberikan bantuan langsung, tetapi juga mereka perlu dimampukan agar memiliki sikap menabung. Tanpa memiliki sikap menabung bakal sulit bagi mereka yang tergolong sangat miskin untuk naik peringkat kedalam kategori miskin. Disisi lain dengan sikap menabung dimaksud, mereka yang tergolong dalam kategori sangat miskin tersebut akan mampu melakukan kegiatan *saving-credit* secara berkelompok setelah naik peringkat kedalam kategori miskin. Agar *saving-credit* secara berkelompok tersebut dapat berjalan secara berkelanjutan hendaknya ditangani melalui sistem satu pintu (*one-gate system*) yakni perbankan dimana Lembaga Pemerintah serta Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) diperankan dalam memberikan dukungan teknis dan kebijakan (Muktasam et al, 2004). Tanpa sistem satu pintu dimaksud perguliran *saving-credit* antar anggota dalam satu kelompok maupun antara kelompok tidak bakal berjalan secara berkelanjutan.

Dalam *saving-credit* diperlukan pendampingan (biasanya oleh LSM) agar berkembang menjadi perilaku (*saving-credit behaviour*). Perilaku ini diperlukan agar mereka yang tergolong dalam kategori miskin tersebut setelah naik peringkat kedalam kategori hampir miskin dapat mengelola kredit yakni Kredit Usaha Rakyat (KUR) yang disalurkan melalui kemitraan dengan perbankan. Dengan adanya KUR ini lapisan masyarakat yang tergolong dalam kategori hampir miskin diharapkan tidak lagi terjerembab kedalam jurang kemiskinan. Melalui perbaikan strategi yang berorientasi pada pertumbuhan (*growth oriented*), maka lapisan masyarakat yang tergolong dalam kategori sangat miskin akan mengalami percepatan untuk naik peringkat kedalam kategori miskin. Demikian pula dengan lapisan masyarakat yang tergolong dalam kategori miskin juga akan mengalami percepatan untuk naik peringkat kedalam kategori hampir miskin.

Dalam teori pertumbuhan lama seperti dikemukakan Harrod-Domar bahwa pertumbuhan ditentukan oleh akumulasi modal yang berasal dari tabungan (Durlauf SN et al, 2001) dan dalam model Solow pertumbuhan tidak hanya ditentukan oleh akumulasi modal, tetapi juga tenaga kerja (Masoud N, 2014).

Dalam teori pertumbuhan lama, akumulasi modal maupun tenaga kerja menjadi variabel endogen; sedangkan teknologi atau pengetahuan merupakan variabel eksogen. Berbeda dengan teori pertumbuhan baru yang dipelopori Romer (1994) bahwa teknologi ataupun pengetahuan bukanlah variabel eksogen, melainkan variabel endogen. Disisi lain, Barro (1989) bahkan menekankan pentingnya investasi modal manusia (*human capital*) yakni peningkatan pengetahuan, teknologi dan keterampilan melalui pendidikan dan pelatihan untuk meningkatkan efisiensi tenaga kerja yang selanjutnya dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Untuk itu perbaikan strategi penanggulangan kemiskinan tidak hanya berorientasi pada pertumbuhan lama (*old growth oriented*), melainkan juga pertumbuhan baru (*new growth oriented*) dalam bentuk pendidikan dan pelatihan termasuk pendampingan.

Pada proyek *Community Based Resources Management* (CBRM) di Lombok Timur yang didanai MCA-Indonesia, strategi penanggulangan kemiskinan bagi masyarakat sekitar hutan di lingkaran Taman Nasional Gunung Rinjani (TNGR) dan KPHL Rinjani Timur dilakukan dalam bentuk pelatihan dan pendampingan (Bappeda Lombok Timur, 2017). Meskipun ada input proyek, tetapi input proyek yang diberikan kepada kelompok sasaran tidak dalam bentuk dana; melainkan dalam bentuk natura. Kelompok masyarakat miskin dalam kawasan hutan (HKm) didampingi dalam pengelolaan Hasil Hutan Bukan Kayu (HHBK). Tujuannya adalah agar mereka tidak lagi menggantungkan hidupnya dari hasil kayu, melainkan dari hasil non kayu seperti budidaya lebah madu dan buah-buahan (misalnya kopi). Kegiatan pelatihan dan pendampingan dimaksud meliputi peningkatan kapasitas organisasi, peningkatan kualitas produk dan rencana bisnis. Disisi lain, warga masyarakat miskin juga dilibatkan dalam pemetaan HKm secara partisipatif. Dengan adanya peta tersebut, warga menjadi semakin mengetahui potensi HKm yang mereka olah. Untuk masyarakat miskin lahan kering diluar kawasan hutan yang berbatasan langsung dengan TNGR

dan KPHL Rinjani Timur diberikan pelatihan dan pendampingan konservasi, yakni pembuatan teras searah garis kontur. Mereka juga diberikan pelatihan dan pendampingan mengenai tanaman kayu/kehutanan, tanaman MPTS, tanaman penguat teras, tanaman semusim yang dibudidayakan pada lahan teras. Wanita setempat yang tergabung dalam Kelompok Wanita Tani (KWT) juga diberikan pelatihan dan pendampingan pengolahan pasca panen seperti pengolahan pisang dan ubi kayu dan jagung menjadi keripik, pengolahan kopi dan jahe menjadi kopi jahe instant, pengolahan labu menjadi roti, dan lain-lain. Dalam mendukung pengembangan ekowisata berbasis masyarakat, wanita diberikan pelatihan dan pendampingan Lembaga Keuangan Mikro (LKM) dan penguatan Koperasi, tujuannya agar mereka tidak lagi tergantung pada rentenir. Berbagai sumber mata pencarian wanita dikembangkan seperti pangan lokal dan produk tenun.

Pembelajaran yang diperoleh dari proyek CBRM di Lombok Timur bahwa strategi penanggulangan kemiskinan pada proyek tersebut tidak hanya bersifat *new growth oriented*, tetapi juga ramah lingkungan (*environmental friendly*). Bahkan dalam proyek CBRM tersebut dikembangkan sebuah sistem yang dikenal dengan Sistem Manajemen Sosial dan Lingkungan (*Environmentaland Social Management System/ESMS*) sebagai capaian yang disyaratkan (*condition precedent*) untuk memastikan bahwa capaian kegiatan proyek adalah ramah lingkungan. Berbagai studi menunjukkan bahwa perekonomian yang tidak ramah lingkungan (*environmental friendly*) telah menjadi pemicu kehancuran suatu bangsa di masa lampau. Studi yang dilakukan oleh Dale dan Carter (dalam Fauzi A, 2009) menunjukkan bahwa degradasi lahan yang disebabkan oleh pembangunan ekonomi tidak ramah lingkungan menjadi katalis bagi runtuhnya kekaisaran Romawi Kuno. Studi lain oleh Naveh dan Hughes serta Groenman-van Waateringe (dalam Fauzi A, 2009) kesemuanya membuktikan bahwa destruksi sumber daya alam dan lingkungan menjadi penyebab runtuhnya peradaban-peradaban di masa lampau.

SIMPULAN DAN SARAN

Simpulan

1. Elastisitas pertumbuhan terhadap kemiskinan menggambarkan perubahan kemiskinan yang dihasilkan oleh pertumbuhan ekonomi. Nilai elastisitas pertumbuhan terhadap kemiskinan di Lombok Timur dalam periode 2011-2016 sebesar minus (-1,92 persen); artinya terjadi penurunan kemiskinan sebesar 1,92 persen yang dihasilkan oleh kenaikan pertumbuhan ekonomi sebesar 1 persen.
2. Indeks Pro-Kemiskinan Pertumbuhan (IPKP) merupakan sebuah perbandingan (rasio) antara perubahan kemiskinan yang dihasilkan oleh pertumbuhan ekonomi seiring dengan berubahnya pemerataan dengan perubahan kemiskinan yang dihasilkan oleh pertumbuhan ekonomi pada tingkat pemerataan tetap. Nilai IPKP di Lombok Timur dalam periode 2011-2016 sebesar 1,15 atau lebih dari satu, sehingga dapat dinyatakan bahwa manajemen penanggulangan kemiskinan di Lombok Timur adalah “pro-poor”.
3. Meskipun manajemen penanggulangan kemiskinan di Lombok Timur telah “pro poor”, tetapi masih diperlukan perbaikan strategi agar berorientasi pada pertumbuhan (*growth oriented*) baik pertumbuhan lama (*old growth oriented*) maupun pertumbuhan baru (*new growth oriented*). Dalam pada itu, capaian yang disyaratkan bagi strategi pertumbuhan dimaksud adalah ramah lingkungan (*environmental friendly*).

Saran-saran

1. Elastisitas pertumbuhan terhadap kemiskinan dan Indeks Pro-Kemiskinan Pertumbuhan (IPKP) hendaknya dijadikan sebagai indikator manajemen penanggulangan kemiskinan oleh pemerintah daerah (TP2KD) Lombok Timur.
2. Strategi penanggulangan kemiskinan yang berorientasi pada pertumbuhan dan ramah lingkungan hendaknya dituangkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Lombok Timur 2018-2023.
3. Disisi lain, strategi penanggulangan kemiskinan yang berorientasi pada pertumbuhan dan ramah lingkungan tersebut juga hendaknya dituangkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Lombok Timur 2025-2045.

DAFTAR PUSTAKA

- Bappeda Kabupaten Lombok Timur, 2017. *Pengukuran Emisi Karbon di Wilayah Kawasan Hutan Kabupaten Lombok Timur*. Laporan Penelitian. Kerjasama Bappeda Kabupaten Lombok Timur dengan Lembaga Pengembangan Pedesaan (LPP). Selong.
- Barro, Robert J., 1989. *Fertility Choice in a Model of Economic Growth*. *Econometrica* 57:481-501.
- Barro, RJ., 2000. *Inequality and Growth in a Panel of Countries*. *Journal of Economic Growth*: 5 (1):5-32.
- BPS Lombok Timur, 2011. *Perhitungan Indeks Pembangunan Manusia Kabupaten Lombok Timur 2011*. Kerjasama BPS Lombok Timur dengan Bappeda Kabupaten Lombok Timur, Selong.
- BPS Lombok Timur, 2017. *Lombok Timur Dalam Angka 2017*. Badan Pusat Statistik Lombok Timur, Selong.
- Brannen Julia, 1993. *Mixing Methods:Qualitative and Quantitative Research*. Avebury, England.
- Darlauf SN et al, 2001. *The local Solow Growth Model*. *European Economic Review*,456:928-940.
- Fauzi, Akhmad, 2009. *Sinergi antara Pembangunan Ekonomi dan Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Lingkungan*. *Jurnal Ekonomi Lingkungan*, Vol.13 No.2.
- Kakwani N. dan Pernia E., 2000. *What is Pro-Poor Growth?*. *Asian Development Review* 18:1-16.
- Kakwani N. et al, 2000. *Growth, Inequality and Poverty: An Introduction*. *Asian Development Review* 18 no.2:1-21.
- Masoud N., 2014. *A Contribution to the Theory of Economic Growth: Old and New*. *Journal of Economics and International Finance* 345:453-474.
- McCulloch and Baulch B., 2000. *Tracking Pro-Poor Growth: New Ways to Spot the Biases and Benefits*. ID21 Insight No.31, Sussex:Institute of Development Studies.
- Muktasam et al. 2004. *Developing Sustainable Microfinance Institution Involving Stakeholders: "The One Gate Model" A Learning Outcome from the ACIAR Project in Lombok Indonesia dalam* Rosiady Husaenie Sayuti & John Klock (ed):*Asian Rural Sociology Presentations of International Conference, March 26-29 2014, Nagoya-Mataram*.
- Ram, R., 2006. *Growth Elasticity of Poverty:Alternative Estimates and A Note of Caution*. *KYKLOS*, 59-2006(4),10
- Ram, R., 2011. *Growth Elasticity of Poverty:Direct Estimates from Recent Data*. *Applied Economics*, 2011(43),9.
- Ravallion dan Chen, 1997. *What Can Survey Data Tell Us about Recent Changes in Distribution and Poverty?*. *The World Bank Economic Review*, 11(2):357-382.
- SMERU, 2016. *Peta Kemiskinan Provinsi Nusa Tenggara Barat*. The SMERU Research Institute, Jakarta.
- Suryahadi Asep et al, 2012. *Economic Growth dand Poverty Reduction in Indonesia Before and After the Asian Financial Crisis*. The SMERU Research Institute, Jakarta.
- Susanti et al, 1995. *Indikator-Indikator Makroekonomi*. Lembaga Penerbit Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia, Jakarta.
- Swanson Donald J. et al, 2014. *Sharpening the Focus of Force Field Analysis*.*Journal of Change Management*, 14 (1):28-47.
- UNDP, 2003. *Human Development Report 2003*. Oxford University Press, New York. World Bank, 2005. *Pro Poor-Growth in the 1990s: Lesson and Insight from 14 Countries*. The World Bank, Washington DC.